P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

PENGARUH PAD, BELANJA MODAL, SiLPA, *LEVERAGE* DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN

Dian Ofasari[1)], Sandrayati[2)], Tiara Nurpratiwi[3)], Martalia Haliza[4)], Aditya Agung Pratama [5)], M. Azizullah Rizkinursya'ban[6)]
[1-6] Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: dianofasari@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), *Leverage* dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sampel penelitian terdiri atas 17 kabupaten/kota dengan 85 observasi yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan *EViews* 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial SiLPA, dan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Leverage, SiLPA.*

Abstract

This study aims to examine the effect of Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure, Budget Surplus (SiLPA), Leverage, and Government Size on the Financial Performance of Local Governments in the regencies and municipalities of South Sumatra Province during the 2020–2024 period. This study employed a quantitative approach using secondary data obtained from the Regional Government Financial Statements audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The research sample consisted of 17 regencies and municipalities, with a total of 85 observations selected using the saturated sampling technique. Panel data regression analysis was employed using EViews 14 software. The findings reveal that, partially, Budget Surplus (SiLPA) and Leverage have no significant effect on Local Government Financial Performance, whereas Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure, and Government Size have a positive and significant effect. Simultaneously, all independent variables have a significant effect on Local Government Financial Performance.

Keywords: *Capital Expenditure, Budget Surplus (SiLPA), Government Size, Leverage, Local Government Financial Performance.*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan bentuk penerapan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur hubungan

keuangan yang adil, selaras, transparan, dan akuntabel antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Aulia & Rahmawaty, 2020). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Mahmudi, 2016)

Berdasarkan publikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, banyak daerah masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri masih terbatas, sehingga kemandirian fiskal belum sepenuhnya optimal. Tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi di Sumatera Selatan tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kemampuan Keuangan
Banyuasin	10.70%	11.96%	12.85%	12.92%	11.62%	Rendah Sekali
Empat Lawang	3.94%	2.90%	5.18%	4.68%	4.70%	Rendah Sekali
Lahat	7.35%	7.84%	8.05%	7.94%	6.64%	Rendah Sekali
Muara Enim	13.78%	10.05%	7.69%	13.11%	10.85%	Rendah Sekali
Musi Banyuasin	11.59%	12.47%	12.78%	10.75%	11.73%	Rendah Sekali
Musi Rawas	10.83%	9.95%	8.24%	7.38%	6.53%	Rendah Sekali
Musi Rawas Utara	6.00%	5.73%	4.67%	5.42%	8.92%	Rendah Sekali
Ogan Ilir	6.57%	7.87%	8.12%	8.80%	8.13%	Rendah Sekali
OKI	10.19%	7.98%	8.84%	9.00%	11.15%	Rendah Sekali
OKU	9.89%	8.37%	9.48%	11.05%	9.41%	Rendah Sekali
OKU Selatan	3.77%	5.26%	4.49%	4.59%	3.78%	Rendah Sekali
OKU Timur	5.25%	7.35%	5.05%	6.77%	6.66%	Rendah Sekali
Pali	5.49%	4.44%	4.56%	5.96%	3.69%	Rendah Sekali
Lubuk linggau	9.50%	16.07%	10.81%	14.46%	13.65%	Rendah Sekali
Pagar Alam	11.47%	8.37%	7.79%	9.51%	11.46%	Rendah Sekali
Palembang	44.89%	51.39%	62.19%	58.99%	52.71%	Sedang
Prabumulih	9.89%	8.95%	11.46%	12.20%	12.25%	Rendah Sekali

Sumber: BPK RI, 2020-2024 data diolah penulis

Tabel tingkat kemandirian pemerintah daerah menunjukkan kondisi yang bervariasi, namun secara umum tingkat kemandirian daerah berada pada kategori rendah sekali. Hanya Kota Palembang yang berada dalam kategori sedang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan belum sepenuhnya optimal. Rendahnya tingkat kemandirian fiskal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai dasar dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai faktor diduga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), *Leverage* dan ukuran pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah dan menjadi indikator utama tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang mampu dihimpun, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018) (Mahmudi, 2016). Oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah diduga mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung pemerintah daerah dalam menarik investasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengalokasian belanja modal yang optimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018)

Selanjutnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran selama satu periode. *Leverage* menunjukkan tingkat penggunaan sumber pendanaan eksternal dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Adapun ukuran pemerintah yang diukur melalui total aset merepresentasikan kapasitas sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kinerja keuagan pemerintah daerah masih menunjukan hasil yang belum konsisten. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (Putri & Ratnawati, 2023) dan (Maulina dkk., 2021) menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan (Ratnasari & Meirini, 2022) menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuagan daerah. Pada variabel belanja modal (Naila dkk., 2025) serta (Ratnasari & Meirini, 2022) menemukan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara (Alfi & Sari, 2023) serta (Saputra & Kurniawati, 2025) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh.

Sementara itu, pada variabel *Leverage*, (Fitasari & Ismawati, 2020) menemukan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan (Alfi & Sari, 2023) memperoleh hasil yang berbeda. Pada variabel sisa lebih perhitungan anggaran, (Ratnasari & Meirini, 2022) menemukan pengaruh negatif, sedangkan (Fitriani & Syarif, 2025) menemukan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Adapun pada variabel ukuran pemerintah, (Nurhayati & Hamzah, 2020), (Meilanda dkk., 2023), (Aulia & Rahmawaty, 2020) menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan (Millenia, 2022) memperoleh hasil yang tidak signifikan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Leverage*, dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kelima variabel tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024.

Kebaruan penelitian ini terletak pada periode penelitian terbaru tahun 2020–2024, serta pengujian kelima variabel independen secara simultan dalam satu model penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Leverage*, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun simultan.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory (Freeman, 1984) menyatakan bahwa eksistensi, keberlanjutan, dan keberhasilan suatu organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh pencapaian internal organisasi itu sendiri, melainkan oleh kemampuannya dalam menciptakan nilai serta memenuhi ekspektasi seluruh pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh operasionalnya (*stakeholders*).

Dalam konteks pemerintahan daerah, entitas sektor publik tidak berorientasi pada maksimalisasi laba (*profit maximization*), melainkan pada penyediaan pelayanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beroperasi dalam ekosistem pemangku kepentingan yang sangat beragam (*multi-stakeholders*), antara lain: Masyarakat / Wajib Pajak (*Taxpayers*): pihak yang menyumbang pendapatan melalui pajak/retribusi dan menuntut infrastruktur serta pelayanan publik berkualitas, Lembaga Legislatif (DPRD): Representasi politik masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan dan persetujuan alokasi anggaran (APBD), pemerintah pusat (Kemenkeu dan Kemendagri): Regulator dan penyedia dana perimbangan/transfer yang menuntut akuntabilitas fiskal dan kepatuhan regulasi, Kreditor / Lembaga Pembiayaan: Pihak penyedia pinjaman daerah yang berkepentingan terhadap solvabilitas dan kelancaran pembayaran kewajiban dan Auditor Eksternal (BPK RI): Penilai independen atas kepatuhan, keandalan pelaporan, dan kewajaran pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, kinerja keuangan pemerintah daerah (baik diukur melalui rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, maupun keserasian belanja) merupakan bentuk pertanggungjawaban dan legitimasi formal atas amanah publik yang dipercayakan kepada pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, *Stakeholder Teory* digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa Pengelolaan PAD, Belanja Modal, SiLPA, *Leverage*, dan kapasitas ukuran entitas merupakan respon strategis pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan (warga, DPRD, pemerintah pusat, dan kreditor). Ketercapaian kinerja keuangan daerah yang optimal menjadi bukti empiris bahwa pemerintah daerah berhasil menjalankan fungsi manajerial fiskalnya secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah menjalankan otonomi, di mana fleksibilitas pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan lokal berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penilaian kinerja keuangan ini umumnya dilakukan melalui analisis berbagai rasio keuangan berbasis data APBD (Halim, 2012:231) (Mahmudi, 2016:169) seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan.

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur secara spesifik menggunakan rasio kemandirian yang dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer (Mahmudi, 2016:170). Pemilihan rasio kemandirian ini didasarkan pada kemampuannya untuk merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menggali potensi ekonomi lokal dan mengelola sumber daya keuangannya secara efisien (Halim, 2012)

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai seluruh perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penerimaan atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya yang disahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kehadiran PAD ini pada dasarnya berfokus untuk memberikan hak dan wewenang penuh kepada pemerintah di tingkat daerah agar mampu mendanai penyelenggaraan otonomi daerah secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada, yang sekaligus menjadi bukti konkret dari keterlibatan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 , belanja modal dikategorikan sebagai pengeluaran yang dialokasikan untuk pembiayaan akuisisi aset serta peningkatan nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberikan kemanfaatan lebih dari satu tahun buku. Penggunaan alokasi anggaran ini di tingkat daerah diatur secara spesifik dalam Pasal 55 Peraturan Pemrintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebuah regulasi yang memuat berbagai ketentuan mendasar mengenai pengelolaan keuangan daerah guna memperkuat sarana dan pelayanan bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, belanja modal berfungsi sebagai bentuk investasi jangka panjang yang menopang pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik, di mana keberadaannya mampu mendorong peningkatan produktivitas ekonomi daerah secara signifikan. Oleh karena itu, besarnya alokasi belanja modal tidak sekadar mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan fisik semata, melainkan juga menjadi pijakan yang sangat strategis demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) didefinisikan sebagai selisih kalkulasi antara surplus atau defisit anggaran dengan total pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD maupun APBN, posisi angka SiLPA idealnya diarahkan hingga menunjukkan nilai nol. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh sumber pembiayaan yang tersedia telah teralokasikan secara optimal untuk menutupi kekurangan atau defisit anggaran yang terjadi.

Melalui alokasi pembiayaan yang proporsional tersebut, penggunaan anggaran daerah dapat terealisasi secara tepat guna dan berdaya guna. Pengelolaan SiLPA yang efektif dan seimbang ini pada akhirnya menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah secara berkesinambungan. (Djuniar & Zuraida, 2018)

Leverage

Dalam konteks keuangan daerah, istilah leverage merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah menggantungkan pembiayaan belanja maupun investasinya pada sumber dana eksternal, terutama yang berasal dari pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pinjaman daerah secara resmi diakui sebagai opsi pembiayaan yang sah untuk mengatasi defisit APBD ataupun membiayai pembangunan fasilitas publik.

Meskipun demikian, pemanfaatan instrumen leverage ini wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko finansial di masa depan. Pembatasan ini diterapkan secara ketat guna memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah tetap stabil dan kesinambungan fiskal dapat terus terjaga dalam jangka panjang.

Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah pada dasarnya merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu entitas pelaporan berdasarkan kapasitas sumber daya ekonomi yang berada di bawah pengelolaannya. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, keberadaan sumber daya ekonomi yang menentukan ukuran pemerintah ini direpresentasikan secara konkret melalui nilai Total Aset.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, aset itu sendiri diartikan sebagai potensi manfaat ekonomi di masa mendatang yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu demi kepentingan pelayanan publik. Oleh sebab itu, jumlah keseluruhan aset yang disajikan dalam laporan neraca daerah menjadi penanda utama untuk mengukur dan mendefinisikan skala ukuran pemerintah daerah tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Peneliti (Putri & Ratnawati, 2023) serta (Maulina dkk., 2021) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, (Ratnasari & Meirini, 2022) menunjukkan hasil berbeda bahwa PAD tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas aset dan penyediaan infrastruktur publik. Pengelolaan belanja modal yang efektif dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara produktif, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Peneliti (Naila dkk., 2025) serta (Ratnasari & Meirini, 2022) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh (Alfi & Sari, 2023) serta (Saputra & Kurniawati, 2025) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola realisasi anggaran selama satu periode. Pengelolaan SiLPA yang efektif dapat menunjukkan adanya perencanaan dan pengendalian anggaran yang baik, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, nilai SiLPA yang terlalu besar juga dapat menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penyerapan anggaran.

Peneliti (Ratnasari & Meirini, 2022) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan (Fitriani & Syarif, 2025) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Leverage menunjukkan tingkat penggunaan sumber pendanaan eksternal dalam mendukung pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Pengelolaan leverage yang tepat dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, namun tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana eksternal dapat meningkatkan beban kewajiban dan risiko keuangan.

Peneliti (Fitasari & Ismawati, 2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan (Alfi & Sari, 2023) memperoleh hasil yang berbeda. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan masih perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

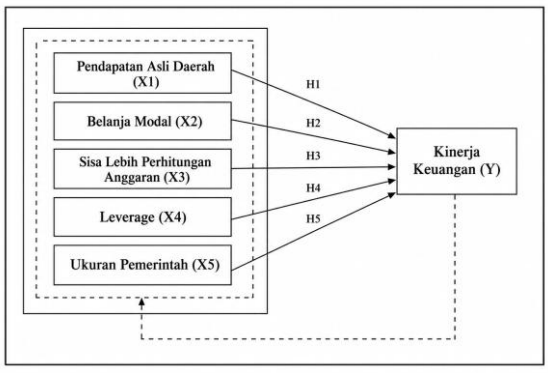
Ukuran pemerintah daerah yang tercermin melalui total aset menunjukkan kapasitas sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin besar pula sumber daya yang dapat dikelola untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Peneliti (Nurhayati & Hamzah, 2020), (Meilanda dkk., 2023), serta (Aulia & Rahmawaty, 2020) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, (Millenia, 2022) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan *Stakeholder Theory* yang menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan wujud akuntabilitas dan legitimasi atas pemenuhan ekspektasi berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan teori tersebut serta hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), *Leverage*, dan Ukuran Pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan antarvariabel tersebut disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Data diolah penulis

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Sumatera Selatan yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Objek penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Populasi penelitian terdiri atas 17 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel. 2 Populasi Penelitian

No.	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banyuasin
2	Kabupaten Empat Lawang
3	Kabupaten Lahat
4	Kabupaten Muara Enim
5	Kabupaten Musi Banyuasin
6	Kabupaten Musi Rawas
7	Kabupaten Musi Rawas Utara
8	Kabupaten Ogan Ilir
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
13	Kabupaten Pali
14	Kota Lubuklinggau
15	Kota Pagar Alam
16	Kota Palembang
17	Kota Prabumulih

Sumber: BPK RI (data diolah 2026)

Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Berdasarkan teknik tersebut diperoleh 17 pemerintah kabupaten/kota dengan total 85 observasi.

Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian. Variabel independen meliputi pendapatan nasli daerah, belanja modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Leverage* dan ukuran pemerintah. Definisi operasional, indikator pengukuran, pengukuran masing-masing variabel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Variabel Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
Kinerja Keuangan (Y)	PAD / Pendapatan transfer x 100%	Mahmudi 2016
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Total PAD	Mahmudi 2016
Belanja Modal (X2)	Belanja Modal / Total Belanja Daerah	Mahmudi 2016
SiLPA (X3)	Surplus/Defisit Anggaran + Pembiayaan Netto	Mahmudi 2016
Leverage (X4)	Total Kewajiban / Total Aset	Mahmudi 2016
Ukuran Pemerintah (X5)	Ln Total Aset	Mahmudi 2016

Sumber: Data diolah Penulis

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi *EViews 14*. Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, dan Uji Hausman untuk menentukan model yang paling sesuai. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0.111251	25.64876	0.288338	24.88694	0.042021	29.03620
Median	0.086739	25.56718	0.247337	25.09163	0.017766	28.83946
Maximum	0.593019	28.03945	2.761794	27.50242	1.004765	30.58079
Minimum	0.025658	24.04999	0.002521	19.05522	0.002052	28.41041
Std. Dev.	0.111019	0.835232	0.281387	1.519286	0.110067	0.519765
Observations	85	85	85	85	85	85

Sumber : Output Eviews 14

Berdasarkan statistik deskriptif variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,025658, nilai maksimum sebesar 0,593019, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,111251, dan standar deviasi sebesar 0,111019. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data kinerja keuangan relatif rendah.

Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 24,04999 dan nilai maksimum sebesar 28,03945, dengan nilai rata-rata sebesar 25,64876 serta standar deviasi sebesar 0,835232. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data PAD relatif homogen selama periode penelitian.

Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 0,002521, nilai maksimum sebesar 2,761794, nilai rata-rata sebesar 0,288338, dan standar deviasi sebesar 0,281387. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata mengindikasikan bahwa variasi Belanja Modal relatif rendah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memiliki nilai minimum sebesar 19,05522, nilai maksimum sebesar 27,50242, nilai rata-rata sebesar 24,88694, dan standar deviasi sebesar 1,519286. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data SiLPA relatif rendah.

Leverage memiliki nilai minimum sebesar 0,002052, nilai maksimum sebesar 1,004765, nilai rata-rata sebesar 0,042021, dan standar deviasi sebesar 0,110067. Standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi leverage antar pemerintah daerah relatif tinggi.

Ukuran Pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 28,41041, nilai maksimum sebesar 30,58079, nilai rata-rata sebesar 29,03620, dan standar deviasi sebesar 0,519765. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dalam sampel penelitian relatif homogen.

Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui uji Chow, dan uji Hausman. Hasil pemilihan model disajikan pada Tabel 5 dan 6

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	67.239017	(16,63)	0.0000
Cross-section Chi-square	246.042441	16	0.0000

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	62.694887	5	0.0000

Sumber: Output Eviews 14

Berdasarkan Tabel 5, hasil Uji Chow menunjukkan nilai Prob. *Cross-section* F sebesar 0,0000 < 0,05, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, tabel 6 hasil Uji Hausman menunjukkan nilai Prob. sebesar 0,0000 < 0,05, sehingga *Fixed Effect Model (FEM)* merupakan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolienaritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas menggunakan nilai Centered VIF disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolienaritas

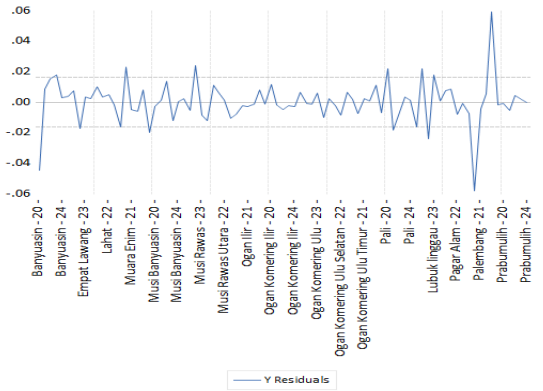
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.218307	70865.10	NA
X1	0.000130	27721.03	1.487987
X2	5.18E-05	2.432420	1.034042
X3	3.71E-06	746.6074	1.021905
X4	0.000323	1.212090	1.027050
X5	0.000376	102946.8	1.474477

Sumber: Output Eviews 14

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Centered VIF pada variabel PAD (X1) sebesar 1,487987, Belanja Modal (X2) sebesar 1,034042, SiLPA (X3) sebesar 1,021905, Leverage (X4) sebesar 1,027050, dan Ukuran Pemerintah (X5) sebesar 1,474477. Seluruh nilai Centered VIF berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model penelitian ini (Ghozali, 2018)

Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan grafik residual. Model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila sebaran residual bersifat acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hasil pengujian disajikan pada Gambar 2.



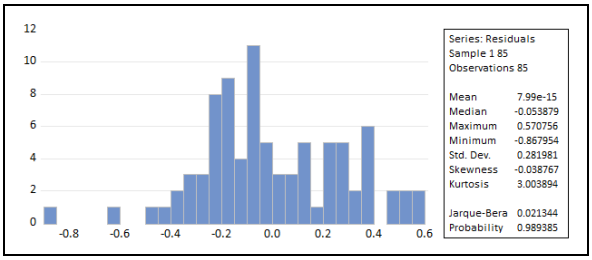
Sumber: Data diolah penulis

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastistas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa residual tidak melewati batas 500 dan -500. Kondisi ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat sama atau konstan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami gejala heteroskedastisitas (Napitupulu dkk, 2021)

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mengikuti distribusi normal, maka digunakan uji normalitas data (Ghozali, 2018)



Sumber: Data diolah penulis

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Gambar 3. menunjukkan hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B) yaitu nilai probabilitas sebesar 0,989385 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson (DW) disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.984066	Mean dependent var	0.111251
Adjusted R-squared	0.978755	S.D. dependent var	0.111019
S.E. of regression	0.016182	Akaike info criterion	-5.191727
Sum squared resid	0.016497	Schwarz criterion	-4.559512
Log likelihood	242.6484	Hannan-Quinn criter.	-4.937433
F-statistic	185.2774	Durbin-Watson stat	2.123978
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews 14

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,123978. Nilai tersebut berada pada rentang 1,5–2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan demikian, residual dalam model penelitian bersifat independen dan telah memenuhi asumsi autokorelasi (Ghozali, 2018)

Hasil Regresi Data Panel

Hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)* disajikan pada Tabel 8. Tabel tersebut menampilkan nilai koefisien, standar error, statistik t, dan probabilitas dari setiap variabel penelitian.

Tabel 9. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.192821	0.467233	-0.412686	0.6812
X1	0.067709	0.011393	5.942935	0.0000
X2	0.022506	0.007198	3.126542	0.0027
X3	0.001996	0.001926	1.036530	0.3039
X4	-0.012019	0.017967	-0.668950	0.5060
X5	-0.051254	0.019395	-2.642717	0.0104

Sumber : Output Eviews 14

Persamman regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Yit = 0{,}192821 + 0{,}067709\ X_1 - 0{,}022506 X_2 - 0{,}001996\ X_3 - 0{,}12019 X_4 - 0{,}51254 X_5 + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa PAD, Belanja Modal, dan SiLPA memiliki arah hubungan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Leverage dan Ukuran Pemerintah memiliki arah hubungan negatif. Nilai konstanta sebesar -0,192821 mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diperkirakan sebesar -0,192821.

Koefisien Determinasi dan Uji Simultan

Pengujian koefisien determinasi dan uji simultan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen serta mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama. Hasil pengujian tersebut disajikan pada

Tabel 10. Koefisien Determinasi dan Uji Simultan

R-squared	0.984066
Adjusted R-squared	0.978755
S.E. of regression	0.016182
Sum squared resid	0.016497
Log likelihood	242.6484
F-statistic	185.2774
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Output Eviews 14

Berdasarkan Tabel 10, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,978755 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), *Leverage*, dan Ukuran Pemerintah mampu menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 97,88%, sedangkan sisanya sebesar 2,12% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa model

regresi layak digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel PAD, Belanja Modal, SiLPA, Leverage, dan Ukuran Pemerintah secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji parsial t

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian parsial disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Parsial t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.192821	0.467233	-0.412686	0.6812
X1	0.067709	0.011393	5.942935	0.0000
X2	0.022506	0.007198	3.126542	0.0027
X3	0.001996	0.001926	1.036530	0.3039
X4	-0.012019	0.017967	-0.668950	0.5060
X5	-0.051254	0.019395	-2.642717	0.0104

Sumber : Output Eviews 14

Berdasarkan Tabel 11, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, SiLPA dan Leverage memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh. Adapun Ukuran Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0104 (<0,05), sehingga berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (Mahmudi, 2016)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri & Ratnawati, 2023) serta (Maulina dkk., 2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengalokasian belanja modal yang tepat diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan (Naila dkk., 2025) serta (Ratnasari & Meirini, 2022) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal yang disertai dengan perencanaan dan pemanfaatan aset yang efektif dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya tingkat kewajiban pemerintah daerah belum menjadi faktor yang menentukan kinerja keuangan, karena kemampuan pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan pendapatan, belanja, dan sumber daya yang dimiliki. Penelitian ini sejalan dengan (Fitasari & Ismawati, 2020) serta (Djuniar & Zuraida, 2018)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya SiLPA tidak secara langsung mencerminkan baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah, karena SiLPA dapat terjadi akibat efisiensi anggaran maupun keterlambatan pelaksanaan program sehingga tidak selalu menggambarkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah (Ratnasari & Meirini, 2022), serta (Putra dkk., 2024)

Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan total aset, maka kinerja keuangan pemerintah daerah cenderung menurun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya aset yang dimiliki pemerintah daerah belum tentu diikuti dengan pengelolaan aset yang optimal, sehingga belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan jumlah aset juga dapat diikuti dengan meningkatnya biaya pemeliharaan dan pengelolaan aset, sehingga apabila tidak dikelola secara efisien dapat mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurhayati & Hamzah, 2020), (Meilanda dkk., 2023), serta (Aulia & Rahmawaty, 2020) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak selalu mencerminkan efektivitas pengelolaan aset. Oleh karena itu, peningkatan jumlah aset belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah apabila aset tersebut belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, SiLPA, *Leverage*, dan Ukuran Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari pengaruh berbagai aspek keuangan daerah secara bersama-sama.

Meskipun secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah yang berpengaruh signifikan, sedangkan SiLPA dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan, secara simultan kelima variabel independen mampu menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, SiLPA, *Leverage*, dan Ukuran Pemerintah secara simultan berperan dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah serta pengalokasian Belanja Modal yang efektif dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, SiLPA dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya SiLPA maupun tingkat *leverage* belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ukuran Pemerintah yang diukur berdasarkan total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak selalu diikuti dengan pengelolaan aset yang efektif, sehingga peningkatan jumlah aset belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, SiLPA, *Leverage*, dan Ukuran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan berbagai aspek keuangan daerah secara terpadu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan utama, mengalokasikan Belanja Modal secara efektif, serta meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah agar dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini adalah Penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2024, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini hanya menganalisis variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, SiLPA, Leverage, dan Ukuran Pemerintah, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah namun belum dimasukkan ke dalam model penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sehingga hasil penelitian bergantung pada informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dan belum mempertimbangkan faktor nonkeuangan yang dapat memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. 5(3), 1098–1114.

Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. 5(4), 584–598.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (N.D.). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020-2024.

Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis,*.

Fitasari, P. N., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar). *Ekonomi BISNIS DAN Kewirausahaan*, *IX*(1), 33–40.

Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Belanja Modal , Dan Silpa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Barat Tahun 2016-2023. *Economics And Financial*, *7*(1). Https://Doi.Org/10.32877/Ef.V7i1.2111

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach.* Boston: Pitman (Pitman Publishing).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik:Akuntansi Keuangan Daerah* (4th Ed.). Salemba Empat.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keti). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik:*Edisi Terbaru.

Maulina, A., Dkk (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research. Http://Journal.Stmikjayakarta.Ac.Id/Index.Php/Jisamar*, *5*(2). Https://Doi.Org/10.52362/Jisamar.V5i2

Meilanda, P., Dkk. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(11).

Millenia, N. A. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran Dan Intergovernmental Revenue Terhdap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, *3*(6).

Naila, M., Dkk. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Dan Jawa Tahun 2018-2022. 21(4), 576–589.

Napitupulu, R. B., Dkk (2021). *Penelitian Bisnis: Teknik Dan Analisa Dengan SPSS, STATA, &Eviews*. Madenatera.

Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi,Dan Manajemen*, *1*(1).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Pub. L. No. 101 (2011). Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/169587/Pmk-No-101pmk022011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010). Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/5095/Pp-No-71-Tahun-2010

Peraturan Pemrintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).

Putra, I. K., Dkk (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *JURNAL Lentera BISNIS*, *13*. Https://Doi.Org/10.34127/Jrlab.V13i1.1049

Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya*, *6*(2), 2068–2082. Https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V6i2.1230

Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. 17.

Saputra, A. D., & Kurniawati, L. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Indonesia Journal Of Digital Business*, *4*(5), 1754–1774.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. (2022). Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/195696/Uu-No-1-Tahun-2022 (Diakses 25 Maret 2026)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38685/Uu-No-23-Tahun-2014 (Diakses 25 Maret 2026)